

WACANA

Vaksin dan Kedaulatan Kesehatan Indonesia

Peringatan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bahwa vaksin Covid-19 baru akan beredar pada awal 2021 merupakan hal yang penting. Pertama, kesadaran terhadap protokol kesehatan untuk dapat bertahan di tengah pandemi menjadi semakin penting. Kedua, terbukti jika bahwa dalam hal kesehatan sekalipun, dalam hal ini vaksin, Indonesia belum memiliki kedaulatan penuh.

Vaksin tersebut merupakan hasil kerja sama PT Bio Farma (Persero) dengan perusahaan farmasi SinoVac, Tiongkok. Sebagaimana prosedur uji dan eksperimen yang harus dilalui, vaksin tersebut masih membutuhkan serangkaian uji klinis sebelum dapat dinyatakan aman dan tepat untuk digunakan pada manusia. Artinya, selama vaksin belum bisa digunakan, selama itu pula kehidupan dan aktivitas belum normal.

Menjaga diri dengan tetap perlu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menerapkan tata laksana lainnya dalam protokol kesehatan adalah langkah wajib untuk melindungi diri dari ancaman Covid-19. Istilah kenormalan baru sebagaimana digunakan selama ini sejatinya bukan sebuah fase yang betul-betul baru, melainkan masa yang memang masih belum normal. Pembatasan aktivitas masih diperlukan.

Catatan penting lain, masyarakat dan bangsa sudah seharusnya memperhatikan secara serius prosedur kedaulatan kesehatan. Bahkan jika untuk vaksin saja Indonesia harus bekerja sama dengan negara lain, ini membuktikan betapa rapuh sebenarnya keamanan dan ketahanan bangsa ditinjau dari sektor kesehatan. Mungkin benar bahwa BUMN farmasi Bio Farma akan turut serta untuk uji klinis dan produksi vaksin tersebut.

Solai kerja sama pembuatan vaksin memang tidak perlu disembunyikan dengan kemas informasi bahwa seolah-olah Indonesia berdaulat memproduksi vaksin tersebut. Pekan lalu misalnya, beredar kabar bahwa Indonesia dikabarkan telah mengembangkan pembuatan vaksin Covid-19. Padahal, vaksin yang disebut-sebut sebagai "vaksin lokal" tersebut adalah jasa hasil kerja sama dengan perusahaan biofarmasi Korea Selatan.

Kerja sama dan jejaring dengan berbagai negara dalam hal kesehatan tetap penting. Namun, jangan dilupakan bahwa pandemi Covid-19 mengingatkan semua pihak untuk menjaga kedaulatan kesehatan. Jika sektor kesehatan pun lebih banyak dibanjeri produk-produk impor, dapat dibayangkan berapa lemahnya ketahanan kesehatan Indonesia. Kedaulatan kesehatan adalah landasan kemerdekaan manusia.

Dinamika Baru Pengawasan Pilkada

Di tengah pandemi Covid-19, tahapan-landasan pilkada serentak digelar. Kondisi tersebut diharapkan jangan sampai mengganggu pelaksanaan. Suasana keadaban yang terjadi bukanlah alasan untuk membuat pesta demokrasi berkurang kualitasnya. Selain para calon dan tim suksesnya harus mengedepankan integritas, para petugas pengawasan juga harus selalu waspada. Kemungkinan-kemungkinan pelanggaran bisa saja muncul, entah diakibatkan oleh tim sukses atau bukan.

Pilkada memiliki posisi strategis untuk menghasilkan kepala daerah yang memiliki kompetensi dan keteladanan. Proses pelaksanaan yang menjunjung tinggi aturan menjadi kuncinya. Namun, kasus-kasus pelanggaran seakan menjadi bumbuh dalam setiap penyelenggaraan pilkada. Pengawasan pelanggaran menjadi hal biasa. Potensi pelanggaran umumnya adalah ketidaknetralan aparat sipil negara (ASN), politik uang, dan politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Untuk pilkada serentak tahun ini diberlakukan regulasi baru terkait teknis kerja serta penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Aturan baru Sentra Gakkumdu Pilkada 2020 diharapkan membuat penanganan terhadap pelanggaran aturan berjalan efektif. Ketegasan penerapan aturan bisa memunculkan efek jera, sehingga memberi pengaruh positif akan kemunculan pilkada, pemilu, dan pilpres yang murni pelanggaran. Tentu saja kemungkinan perbaikan ketentuan tetap terbuka pada masa datang.

Saat ini dari ketentuan yang berlaku terlihat adanya upaya memperbaiki kecenderungan dalam penanganan. Urus yang rapi antar lembaga terkait sejak laporan masuk. Agar jaksa terlihat mulai dari titik awal pengalihan hukum, persyaratan pengalihan minimal dipap. Tidak perlu lagi ketegangan-pengalihan tiga tahun sebagai penuntun uji unsur kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu. Dalam beberapa kasus, penyidik dan jaksa juga dimungkinkan untuk ditambah jumlahnya.

Keterlibatan jaksa dan polisi sedari kasus bermula memang terasa dibutuhkan. Dari berbagai pilkada, poco ketentuan atau tidak dilanggar seperti benar adanya. Karena itu mutu penegakan hukum pilkada harus terus ditingkatkan. Salah satu caranya dengan adanya kesempatan kepada penyidik dan jaksa untuk lebih masuk lebih dini, pada saat koordinasi. Secara umum Sentra Gakkumdu Pilkada sebenarnya adalah mekanisme koordinasi di bawah Divisi Penanganan Pelanggaran Baswasu.

Dengan perubahan ketentuan diharapkan efektivitas penanganan kasus juga meningkat. Petugas-petugas di lapangan sebagai ujung tombak menjadi kunci bagi ketertarikan harapan tersebut. Mereka dituntut memiliki motivasi tinggi untuk menjalankan tugas dengan baik. Tentu perlu dukungan sistemik, seperti yang diungkapkan Kapoli Jenderal Idham Azis. Polri telah menjanjikan reward bagi para anggotanya yang dinilai sukses, saat ini motivasi di Sentra Gakkumdu Pilkada.

Solusi Kesenjangan Kompetensi Lulusan

Oleh Ferdinand Hindiarso



SALAH satu bidang yang amat terdampak oleh wabah Covid-19 adalah pendidikan. Dampak itu tidak hanya dalam proses pembelajarannya, namun juga pada kualitas atau kompetensi lulusan.

Para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan tidak dapat menjalani proses pembelajaran secara utuh sesuai dengan kurikulum yang telah dipersiapkan. Pembelajaran *online* atau dalam jaringan (daring) hanya mengembankan aspek *knowledge* (pengetahuan) peserta didik. Padahal sebuah kompetensi memiliki tiga aspek utama, yaitu *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keterampilan), dan *attitude/behavior* (sikap).

Lebih-lebih pada sekolah-sekolah yang seharusnya lebih menitikberatkan pada aspek keterampilan. Dapat diprediksi, akibat pandemi ini, akan terjadi kesenjangan kompetensi pada lulusan. Karena itu, perlu dipersiapkan berbagai langkah antisipasi sebagai solusi atas kesenjangan tersebut.

Agar mendapatkan solusi yang tepat, diperlukan pula kepedulian yang rapi antar lembaga pihak yang menaungi kepentingan di dunia pendidikan, baik Kementerian Pendidikan, pihak sekolah, lembaga sertifikasi profesi, organisasi asosiasi profesi, organisasi asosiasi profesi, m a u p u n

tersebut, pengetahuan adalah aspek yang paling mudah dikembangkan, sedangkan mengembangkan aspek keterampilan dan sikap relatif membutuhkan waktu dan usaha yang lebih.

Aspek keterampilan harus dikembangkan melalui latihan, simulasi, praktik berulang yang disertai dengan pemberian *feedback*.

Aspek sikap idealnya dikembangkan melalui pengalaman interaksi nyata di lapangan. Di sinilah unsur kesenjangan yang dialami oleh para lulusan lembaga pendidikan selama masa pandemi ini.

Keempat, untuk berlatih, praktik, dan mengalami secara langsung pun hilang. Jika latihan dan praktik untuk mengembangkan keterampilan dilakukan secara virtual, tentu saja hasilnya juga akan berbeda jika dibandingkan dengan keterampilan yang dikembangkan secara langsung. Sebagai contoh para mahasiswa program studi keperawatan yang tidak dapat melakukan praktik di rumah sakit, tentu akan kehilangan banyak keterampilan dan pengalaman yang tidak dapat digantikan oleh pembelajaran secara daring.

Demikian juga dengan para siswa SMK yang kehilangan kesempatan untuk melakukan praktik atau magang sebagai media untuk mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja.

Praktik lapangan atau magang tidak hanya berperan untuk mengembangkan *hard skill* (keterampilan fisik), namun sekaligus juga untuk membangun sikap atau *soft skill*.

Melalui kegiatan praktik kerja lapangan atau magang para siswa atau mahasiswa akan mendapatkan berbagai macam pengalaman tentang sikap dan perilaku kerja.

Alternatif Solusi

Kesenjangan kompetensi pada lulusan akibat pandemi Covid-19 tidak



Asosiasi profesi sudah seharusnya berperan dalam mengatasi kesenjangan kompetensi ini dengan menyiapkan berbagai *crash program* untuk membantu para lulusan. Untuk mengatasi para lulusan yang terdampak pandemi Covid-19, maka program dapat dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sedikit. Asosiasi profesi dapat meminta para anggotanya untuk menyediakan kesempatan kepada para lulusan berlatih dan belajar melalui program ini.

Terkait dengan sertifikasi kompetensi, maka asosiasi profesi dapat berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sehingga uji kompetensi dapat diselenggarakan secara program ini.

Dengan beberapa alternatif solusi tersebut, semoga generasi yang menjalani pendidikan dan lulus selama masa pandemi Covid-19 ini tetap dapat mengembangkan dan memiliki kompetensi yang seharusnya mereka miliki. (4)

—Dr Ferdinand Hindiarso, Dosen Fakultas Psikologi UIN, Saesji Pranata Semarang.

Samarangan
92 penyelewan dana bansos corona diungkap.
Teganya...teganya...
Aset Djoko Tjandra harus dibekukan.
Sebelum asetnya minta surat jalan dan kabur.
Sirpong
(Terus berusaha hindari beku ide.)

SUAR MERDEKA
Terbit sejak 11 Februari 1950
PT Suara Merdeka Press

perusahaan-perusahaan yang akan menerima pada lulusan ini sebagai tenaga kerja mereka.
Hal pertama yang harus dipahami bersama adalah bagaimana sebuah kompetensi terbentuk dan dikembangkan. Merujuk pada buku *The Art & Science of Competency Models* yang ditulis oleh Antoinette D Lucia & Joseph Lepsinger (1999), kompetensi memiliki tiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiganya akan menentukan keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik.
Menurut ketua penulis buku

Kirimkan artikel wacana nasional ke: wacana.nasional@gmail.com. Panjang maksimal 5.000 karakter dengan spasi, sertakan deskripsi foto, serta link (filed)